

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan telah menjadi tantangan fundamental yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi, tidak hanya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju di seluruh dunia. Persistennya angka kemiskinan yang masih tinggi menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai faktor berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan, diantaranya adalah disparitas ekonomi yang melebar, rendahnya tingkat pendapatan per kapita, serta belum maksimalnya kapasitas pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Kondisi tersebut saling berkaitan dan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. BPS menetapkan kriteria kemiskinan berdasarkan standar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Seseorang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita dalam rumah tangga setiap bulan tidak mencapai batas minimum yang telah ditetapkan sebagai garis kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2023, BPS menetapkan garis kemiskinan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur pada angka Rp 550.458 per bulan. Angka ini mengindikasikan bahwa individu yang memiliki pengeluaran harian dibawah Rp 18.348 masuk dalam kategori penduduk miskin. Realitas ini menggambarkan terbatasnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Annisa & Anwar, 2021).

Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur telah mencatatkan pertumbuhan investasi dan peningkatan tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator positif dalam perekonomian daerah. Namun, fakta ini belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih signifikan. Salah satu pendekatan strategis untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan memaksimalkan dampak investasi. Investasi tidak hanya berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Mufida et al., 2021). Penambahan kesempatan kerja mampu menekan angka pengangguran yang secara langsung mendorong peningkatan pendapatan per kapita serta memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk (Misdawita & Sari, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Kiky Asmara (2018), investasi bidang industri terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi memungkinkan pendirian fasilitas produksi baru yang memerlukan tenaga kerja lebih banyak, sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan bahwa sektor industri harus mampu menghasilkan *multiplier effect* (efek berganda) yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di masyarakat sekitarnya. Lebih jauh, beliau menekankan bahwa keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial berpotensi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan penciptaan lapangan kerja baru yang menekankan angka pengangguran, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Perekonomian & Indonesia, 2023).

Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan masalah ketenagakerjaan. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tetapi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan yang merata. Tingginya taraf hidup masyarakat mencerminkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan mudah yang pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Salah satu tolak ukur peningkatan taraf hidup adalah terciptanya lapangan kerja baru yang mampu menyerap penduduk usia kerja secara efektif. Di sisi lain, pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya yang tersedia akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan (Pranata & Idris, 2021).

Peningkatan produktivitas dianggap sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemampuan untuk memanfaatkan faktor produksi secara optimal tercermin dari produktivitas yang tinggi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai output masyarakat melainkan juga mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal memiliki peranan krusial dalam memperluas kesempatan kerja serta mendorong peningkatan taraf pendapatan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kesempatan untuk mencapai kesejahteraan semakin besar, terutama melalui pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pengaruh dari investasi yang

tepat terlihat dalam peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan jumlah penduduk miskin (Sholihah et al., 2001).

Kesempatan bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya semakin besar dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan dan alokasi sumber daya ekonomi yang efisien oleh pemerintah dan sektor swasta. Investasi berperan penting dalam mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan distribusi pendapatan yang merata di berbagai golongan masyarakat. Pemerataan pendapatan tidak hanya mendukung stabilitas sosial, tetapi juga mencegah ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan di berbagai wilayah. Manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat jika distribusi pendapatan lebih merata dan kesempatan kerja diperluas, Langkah ini dianggap krusial dalam upaya pengurangan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan (Arya & Primandhana 2023).

Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satunya adalah peran yang dimainkan oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari tenaga kerja. Pendayagunaan tenaga kerja secara optimal melalui penciptaan lapangan kerja baru dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mendukung pemerataan pembangunan (Agustin, 2022). Investasi menjadi kunci strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menciptakan peluang ekonomi, dan secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, kebijakan investasi yang berkelanjutan dan inklusif harus didukung

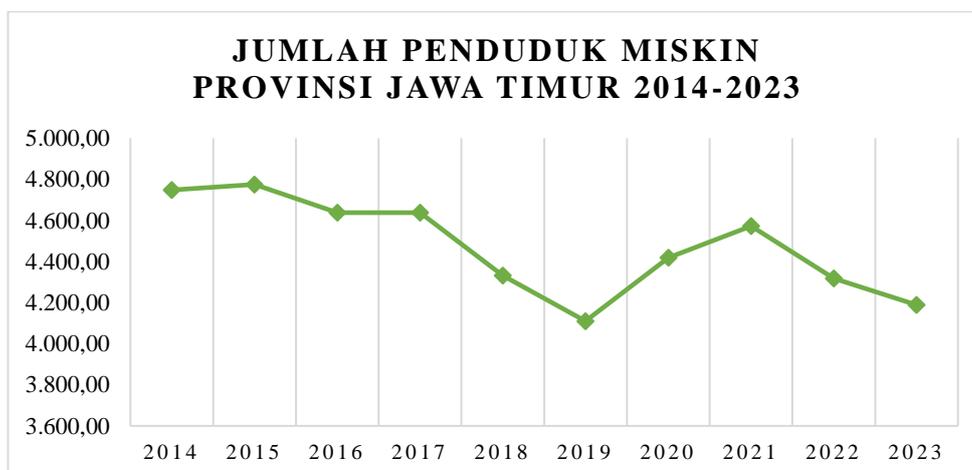
oleh peningkatan kualitas tenaga kerja untuk menurunkan angka kemiskinan (Purnomo, 2020).

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah penduduk miskin yang tinggi di provinsi ini menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,56 persen poin, menjadikan penurunan tertinggi se-Pulau Jawa. Prestasi ini menunjukkan efektivitas upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan menjadi pencapaian yang patut diapresiasi (Dinas Sosial Jawa Timur, 2024). Selain itu, prestasi lainnya adalah keberhasilan Jawa Timur dalam mencatat angka kemiskinan terendah sejak 2010, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan kemiskinan. Upaya peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat terus didorong untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanannya tinggi. Meski investasi di wilayah ini terus tumbuh yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, penurunan kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Ketimpangan distribusi lapangan kerja dan pendapatan di antar wilayah provinsi ini menjadi faktor utama yang memperlambat proses pengurangan jumlah penduduk miskin. Peningkatan investasi di provinsi tersebut membawa potensi besar untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, dampaknya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin memerlukan pengelolaan yang lebih terfokus, terutama pada pemerataan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dan

terpencil. Pemerintah daerah bersama sektor swasta terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja dan investasi pada sektor-sektor strategis. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang beresiko terkena kemiskinan dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Arya & Primandhana, 2023).

Menurut Faisal (2002) upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui transformasi sistem yang lebih terbuka dan inklusif. Pemerintah perlu memperkuat akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi, termasuk melalui reformasi kebijakan yang selama ini cenderung membatasi akses mereka. Di sisi politik, penguatan dilakukan dengan membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, di sisi ekonomi, pemerintah perlu menciptakan sistem yang mendukung distribusi sumber daya secara lebih merata, sehingga kelompok miskin dapat memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Data yang ditampilkan pada grafik menggambarkan pola penurunan JMP di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014 hingga 2023. Selama periode 2014-2019, JMP menunjukkan penurunan yang konsisten dengan angka tercatat sebanyak 4.332,00 ribu jiwa pada 2018 dan turun menjadi 4.110,00 ribu jiwa pada 2019. Namun, pada 2020 angka tersebut mengalami kenaikan kembali menjadi 4.419,10 ribu jiwa, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian global. Kenaikan jumlah penduduk miskin berlanjut hingga tahun 2021, di mana angka kemiskinan mencapai 4.572,30 ribu jiwa menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat. Namun, situasi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 4.318,29 ribu jiwa, dan terus berkurang lagi pada tahun 2023 menjadi 4.189,00 ribu jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi pemulihan ekonomi di provinsi tersebut yang berdampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, pada tahun 2023 beberapa daerah di provinsi tersebut mencatatkan angka kemiskinan tertinggi yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang terlihat pada grafik di atas, upaya strategis lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tren positif ini terus berlanjut. Salah satu faktor yang dapat mendukung pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan adalah investasi. Investasi yang meningkat tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Menurut Laporan Kinerja Penanaman Modal tahun 2023, realisasi investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur

mencapai Rp74,9 triliun, dengan 5.412 proyek, menjadikannya salah satu provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Di samping itu, realisasi Penanaman Modal Asing di Jawa Timur mencapai Rp70,2 triliun, menghasilkan total investasi sebesar Rp146 triliun, yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi sebesar 31,72% di tahun 2023 ini melampaui rata-rata pertumbuhan investasi nasional dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal, terutama dalam membuka lebih banyak peluang kerja yang secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Peningkatan investasi yang signifikan di Provinsi Jawa Timur berperan besar dalam menciptakan peluang kerja baru, yang pada gilirannya mendukung penurunan kemiskinan. Berdasarkan laporan, sektor-sektor seperti industri pengolahan dan perdagangan menjadi yang utama dalam menyerap tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja yang efektif menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, karena semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Menurut Madhani et al., (2024), investasi yang terus meningkat tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Peningkatan investasi baik domestic maupun asing dapat menciptakan lapangan kerja baru yang akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan kemiskinan (Paramita & Christianingrum, 2022). Selain itu, perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur setiap tahunnya menggambarkan dinamika ekonomi dan sosial. Masalah ini dapat

ditangani melalui kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemerataan kesempatan ekonomi (Baskoro, 2017).

Laporan statistik yang dipublikasikan oleh BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa populasi angkatan kerja di wilayah tersebut mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 23,87 juta jiwa yang masuk dalam kategori angkatan kerja, angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial bila dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2022 yang mencapai 22,87 juta jiwa. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi dan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Meskipun terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 dan 2017, tren peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan positif. Angka angkatan kerja yang tinggi di kabupaten/kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan menunjukkan kontribusi penting dari sektor-sektor yang berkembang, seperti industri, perdagangan, dan jasa, terhadap total angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja ini menjadi indikator bahwa lebih banyak penduduk yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja. Dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang terlibat dalam sektor-sektor produktif, peluang untuk mengurangi kemiskinan juga semakin besar, karena lebih banyak individu yang dapat memperoleh pendapatan tetap.

Melihat adanya kenaikan signifikan dalam jumlah angkatan kerja di Jawa Timur, penting untuk memahami bagaimana berbagai faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per individu menjadi tolak ukur utama yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat di sebuah wilayah.

Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam sektor produktif, diharapkan pendapatan per kapita juga diperkirakan akan mengalami peningkatan. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru memainkan peran krusial dalam meningkatkan pendapatan per kapita, karena lebih banyak individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Selain itu, aglomerasi industri dan keberadaan tenaga kerja produktif berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Yanti et al., 2023). Seiring dengan itu, kenaikan pendapatan per kapita akan berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Provinsi tersebut.

Data dari BPS Jatim menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di provinsi ini terus meningkat selama periode 2008–2023. Peningkatan terbesar tercatat pada tahun 2013, ketika pendapatan per kapita naik secara signifikan menjadi 24,90 juta rupiah. Pendapatan per kapita terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan per kapita hanya mencapai 47,80 juta rupiah. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita kembali meningkat menjadi 58,00 juta rupiah, yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah masa ketidakstabilan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi, seperti investasi dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat, telah berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Ragnar Nurkse (1953), lingkaran setan kemiskinan terjadi ketika produktivitas tenaga kerja berada pada tingkat yang rendah, hal ini berujung pada

pendapatan yang terbatas, sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kuncoro (2010) menambahkan bahwa lingkaran ini dipicu oleh keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan keterbatasan aset. Selain itu, keterbatasan modal memperparah kemiskinan dengan menghambat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pengangguran, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Investasi yang lebih besar menjadi solusi utama untuk memutus lingkaran kemiskinan ini. Dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, membuka lebih banyak kesempatan kerja dan memperbaiki pendapatan per kapita sehingga investasi dapat secara perlahan menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori di atas menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan, nutrisi, dan pendidikan, yang kemudian menurunkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (M. P. T. dan S. C. Smith, 2011). Kondisi di Jawa Timur justru bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonominya. Menurut BPS tahun 2022 ekonomi provinsi ini tumbuh sebesar 5,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Namun, meskipun pertumbuhannya signifikan, hal ini belum cukup menurunkan angka kemiskinan. Diperlukan dukungan lain seperti investasi di sektor strategis, penguatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan per kapita. Investasi yang lebih besar dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di provinsi ini.

Investasi di provinsi ini memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan. Berdasarkan penelitian Hanim (2017), mengungkapkan bahwa injeksi

model investasi secara langsung mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan produktivitas SDM. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Kusreni (2019) juga menyatakan adanya korelasi terbalik antara aktivitas investasi dengan angka kemiskinan. Menurut penelitiannya, ekkalasi investasi berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita. Kondisi ini menciptakan efek domino positif, dimana naiknya tingkat pendapatan per kapita memungkinkan masyarakat untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup mereka secara lebih memadai, yang pada gilirannya berperan dalam menekan laju kemiskinan. Penelitian oleh Sulistiawati (2020) mengindikasikan bahwa investasi memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pertumbuhankonomimi serta kemampuan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong naiknya taraf hidup masyarakat. Selain itu, Komariyah et al., (2020) menjelaskan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti investasi, kinerja ekspor, dan inflasi. Ketiga aspek tersebut secara tidak langsung berperan dalam menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan dari investasi di sektor strategis memperkuat dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam berkontribusi terhadap perekonomian. Peningkatan pendapatan masyarakat turut memperkuat daya beli yang kemudian menjadi pendorong bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di provinsi ini.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis berfokus pada permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengentaskan fenomena ini, penulis menganalisis lebih lanjut mengenai investasi, produktivitas tenaga

kerja, dan pendapatan per kapita sebagai faktor utama yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul **“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur.”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Pendapatan Per kapita berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan per kapita berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga kejelasan dan ketajaman analisis, ruang lingkup penelitian dibatasi dengan cermat. Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pendapatan per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan tiga manfaat utama.

1. Bagi peneliti, studi ini menjadi bagian penting penyelesaian tugas akhir di Program Studi Ekonomi Pembangunan dan penerapan langsung ilmu yang telah dipelajari.
2. Bagi universitas mendapatkan tambahan referensi berharga untuk kajian serupa dikemudian hari.
3. Bagi pembaca memperoleh perspektif yang dapat dijadikan landasan pengembangan penelitian ekonomi dan bidang terkait lainnya.